

IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (Struktur dan Kendalanya)

Farid Firmansyah

Abstrak : Pemerintah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin kualitas pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum ini memang bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi, perubahan kurikulum, dari Kurikulum Berbasis Kompetensi ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menjadi tantangan baru bagi guru. Paradigma guru yang terbiasa sebagai pelaksana kurikulum, tiba-tiba harus/dipaksakan untuk menjadi pengembang sekaligus pelaksana kurikulum (sebagaimana dituntut dalam KTSP) tentu bukan pekerjaan mudah. Karena itu, implementasi KTSP masih akan menghadapi banyak kendala.

Kata kunci : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, struktur, kendala

Pendahuluan

Mulai tahun 2006, pemerintah telah menetapkan rambu-rambu pengembangan kurikulum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan berusaha mengadakan penyempurnaan kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuju Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan kurikulum ini dilakukan untuk semakin menjamin kualitas pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Pengembangan KTSP ini tentu saja masih menjadi tanda tanya besar dalam tataran implementasi, terutama dalam hal kesiapan dan kemampuan pihak terkait untuk mengimplementasikan KTSP. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan KTSP, antara lain faktor kesiapan guru dan kondisi peserta didik. Dapat dikatakan, betapapun bagus suatu kurikulum, hasilnya sangat tergantung pada kesiapan guru dan murid.²

Makna Kurikulum

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum.³ Kurikulum merupakan “peta jalan” yang akan menjadi acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Dengan demikian, kurikulum mempunyai peranan sentral karena menjadi arah atau titik pusat dari proses pendidikan.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan, pengertian kurikulum tidak lagi diartikan secara sempit atau terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas dari itu, kurikulum bisa meliputi aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam

¹Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 2 dan 3.

²Syafruddin Nurdin & M. Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 75.

³Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin *currere* yang berarti *to run* (menyelenggarakan) atau *to run the course* (menyelenggarakan suatu pengajaran). Dari sini kemudian muncul berbagai definisi mengenai kurikulum. Misalnya Harold B. Albertys (1965) memandang kurikulum sebagai “*all of the activities that are provided for students by the school*”. Dalam hal ini, kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan diluar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Definisi ini melihat manfaat kegiatan dan pengalaman siswa di luar mata pelajaran tradisional. Sedangkan J.G. Saylor et.al. memandang kurikulum dalam empat sisi, yaitu : (1) kurikulum sebagai tujuan, (2) kurikulum sebagai kesempatan belajar yang terencana, (3) kurikulum sebagai mata pelajaran, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman. Sementara Caswell mendefinisikan kurikulum sebagai jumlah atau keseluruhan pengalaman yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sekolah.

belajar untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan belajar-mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar-mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran, dan sebagainya⁴.

Suatu kurikulum harus mencerminkan, baik secara eksplisit maupun implisit, asumsi-asumsi yang dianutnya, mengenai tujuan dan hakekat pendidikan, tujuan dan hakekat kurikulum, asumsi mengenai siswa, proses pendidikan dan pengajaran, visi penyusunan kurikulum mengenai harapan, tuntutan serta kebutuhan yang sedang dan akan dihadapi oleh pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan substansi keunggulan kompetitif yang mampu bersaing secara substantif maupun metodologi.

Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Atas dasar ini, pemerintah menelorkan kurikulum baru, yaitu KTSP sebagai strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi.

KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah.⁵ Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP, yaitu: ⁶

⁴Ibid., hlm. 34.

⁵Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum.

⁶E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.20.

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

- a. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik siswa.
- b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pada sistem KTSP, sekolah memiliki "*full authority and responsibility*" dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.⁷ Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, KTSP dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan kurikulum agar lebih familiar dengan pengelola pendidikan di tingkat sekolah, terutama guru, karena mereka banyak dilibatkan dalam KTSP dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai.⁸

⁷Penerapan sistem yang demikian terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut: (1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. (2) Sekolah lebih tahu kebutuhan lembaganya. (3) Pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. (4) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif. (5) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua dan masyarakat. (6) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. (7) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah begitu cepat, serta mengkomodifikasinya dalam KTSP. Lihat *Ibid.*, hlm. 23.

⁸*Ibid.*, hlm. 9.

Dalam KTSP, kiprah guru lebih dominan, terutama dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis, juga dalam pembelajaran nyata di kelas.

Prinsip Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Terdapat 7 prinsip umum berkaitan dengan proses belajar, yaitu⁹: (1) Perhatian dan Motivasi, (2) Keaktifan, (3) Keterlibatan Langsung dan Berpengalaman, (4) Pengulangan, (5) Tantangan, (6) Penguatan, dan (7) Perbedaan Individual. Prinsip-prinsip ini juga mulai diadaptasikan dan diterapkan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.¹⁰

KTSP dikembangkan oleh sekolah dan Komite Sekolah dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk

⁹M. Muchlis Solichin, "Belajar dan Mengajar dalam Pandangan Al-Ghazali", dalam *TADRIS Jurnal Pendidikan Islam* (Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, Vol. 1, No. 2, 2006), hlm.138-153.

¹⁰Prinsip-prinsip khusus dalam KBK adalah; (1) Dokumen kurikulum sebaiknya mampu beradaptasi dengan perubahan: a. Berisi hal-hal yang pokok, b. Fleksibel, c. Mudah disesuaikan dengan jaman, d. Sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. (2) Pengembangan kurikulum sesuai dengan proses akreditasi yang meningkatkan mata pelajaran dapat dimodifikasi: a. Bisa ditambah dan dikurangi, b. Yang baik dipertahankan, c. Yang jelek diperbaiki/diganti. (3) Siswa yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi tertentu. Baca dalam ; Haris Supratno, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Makalah disajikan dalam Seminar Pendidikan di STAIN Pamekasan, 12 Juni 2005. Sedangkan Mulyasa mendeskripsikan prinsip-prinsip ini ke dalam: (1) keimanan, nilai, dan budi pekerti, (2) penguatan integritas nasional, (3) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (4) kesamaan memperoleh kesempatan, (5) abad pengetahuan dan teknologi informasi, (6) pengembangan keterampilan hidup, (7) belajar sepanjang hayat, (8) berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, dan (9) pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Lihat E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.70-72.

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik

yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹

Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Struktur kurikulum terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Komponen mata pelajaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; yang dilaksanakan melalui kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan jasmani.

¹¹Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, *Materi Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, 2006), hlm. 3-5. Lihat juga Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan*, hlm.151-153. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No.22 Tahun 2006.

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
4. Kelompok mata pelajaran estetika; yang dilaksanakan melalui kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan.
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; yang dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam dan muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.¹² Adapun muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang cakupan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

Secara praktis, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Sehubungan dengan itu kurikulum dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarga-

¹²*Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, hlm. 10. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), dan standar isi (SI). SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini tersebut mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Lihat Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan*, hlm. 26.

negara, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.¹³

Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Dalam hal ini, substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Di samping itu, setiap satuan pendidikan dan sekolah dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, yang dalam pelaksanaannya merupakan bagian dari semua mata pelajaran. Adapaun kaitannya dengan waktu, setiap satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.¹⁴

Setiap kelompok mata pelajaran di atas dilaksanakan secara holistik, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.

Kendala Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan, sejak itu pula kurikulum dibuat secara sentralistik, dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa, sehingga satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun pemerintah pusat menyertai kurikulum tersebut. Dalam hal ini setiap guru tinggal menjabarkan kurikulum tersebut di sekolah masing-masing, dan biasanya yang berkepentingan adalah guru.

¹³Ibid., hlm. 12. Lihat juga *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003*.

¹⁴ Ibid., hlm.13-14.

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Hal ini menjadikan guru menjalani instruksi kurikulum¹⁵ dan hanya melaksanakan pembelajaran berdasarkan urutan bab dalam buku teks sebagai satu-satunya acuan pembelajaran. Akibatnya, ketika mereka dihadapkan pada ujian nasional, mereka sering kelabakan, ketakutan kalau peserta didik di sekolahnya tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian dan tidak lulus.¹⁶

Kehadiran KTSP ini diharapkan menjadi motivasi guru untuk meningkatkan kreativitas dalam menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Akan tetapi, harapan itu nampaknya masih jauh dari realita. Banyak kendala yang masih akan dihadapi dalam pelaksanaan KTSP. Sentot, dalam tulisannya tentang “KTSP (Kurikulum Tidak Siap Pakai)”¹⁷ setidaknya menyebutkan 2 kendala dalam penerapan KTSP :

1. Penyerahan pengembangan indikator kompetensi dasar kepada guru dinilai sebagai langkah yang terlalu berani. Pendapat ini didasarkan atas rendahnya kualitas guru. Pernyataan ini didasarkan dari data yang diperolehnya bahwa hanya 31,2% guru SD di Jawa yang bergelar S1, sedangkan di luar Jawa hanya 15,2 %. Selain itu juga didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini guru hanya sebagai pelaksana kurikulum, sehingga tidak mudah mengubah cara berpikir guru sebagai “pelaksana kurikulum” menjadi “pengembang sekaligus pelaksana kurikulum.”
2. Bentuk tes tulis yang dilakukan secara tersentral semacam ujian nasional bertentangan dengan hakikat KTSP yang tolok ukur keberhasilan belajar siswa ditentukan secara mandiri oleh sekolah.

¹⁵ Maka dari itu proses pembelajaran menjadi sangat rutin dan mekanistik, karena bertujuan menguasai standar nasional. Pembelajaran bagaikan menjalani instruksi kurikulum, menjadi kegiatan rutin yang prosedural, menempatkan otoritas guru melebihi batas sebagai figur, sambil mengorbankan potensi kreatif dan kritis anak didik yang seharusnya merupakan model pedagogis yang penting. Praktik belajar mengajar selama ini kita lebih beranggapan bahwa mendidik hampir disamakan dengan upaya mencekoki atau proses memindahkan ilmu pengetahuan kepada anak didik sebanyak-banyaknya. Akibatnya, anak menjadi pasif atau bahkan sebagai subjek manusia secara pedagogis telah mati, karena mereka hanya menjadi konsumen dan bukan produsen ilmu pengetahuan.

¹⁶ Ibid., hlm.4-5.

¹⁷ Kompas, Rabu, 3 Januari 2007.

Mengingat potensi kendala yang dihadapi dalam penerapan KTSP, ada beberapa saran untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, yaitu: *Pertama*, penyediaan model KTSP yang lengkap dan “benar”. Penyediaan ini merupakan suatu kebutuhan yang paling utama agar penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar; *Kedua*, sosialisasi yang efektif. Biasanya setiap kali terjadi pergantian kurikulum, masalah yang sering dihadapi adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dapat menimbulkan kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya; *Ketiga*, dukungan terhadap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini karena tuntutan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk terciptanya komunikasi efektif antara kepala sekolah, guru, komite sekolah dan masyarakat¹⁸.

Penutup

Penyusunan KTSP banyak melibatkan satuan pendidikan, sekolah, dan daerah masing-masing. Dengan cara ini, diasumsikan bahwa guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan akan sangat bersahabat dengan dengan kurikulum tersebut. Asumsi demikian karena mereka terlibat langsung dalam proses penyusunan KTSP, sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Di samping itu, mereka pula yang akan melaksanakan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang dilakukannya, sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru secara profesional.

Agar asumsi di atas dapat tercapai secara optimal, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP dituntut bekerja mandiri dan selalu memperbaiki diri, utamanya guru. Hal ini penting agar guru benar-benar menjadi guru yang mampu digugu dan ditiru, sehingga tidak saja mampu mengembangkan KTSP tetapi juga melaksanakannya dalam pembelajaran secara efektif dan menyenangkan. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.**

¹⁸Ibid.